

# Analisis Nalar Generasi Zoomer Muslim Tentang Demokrasi Islami: Studi Terhadap Mahasiswa UIN-Sumatera Utara

T. Rubby Irfansyah<sup>1</sup>, Mardian Idris Harahap<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Magister Pemikiran Politik Islam UIN-Sumatera Utara

<sup>1</sup>[rubby3001243002@uinsu.ac.id](mailto:rubby3001243002@uinsu.ac.id), <sup>2</sup>[mardianidris@uinsu.ac.id](mailto:mardianidris@uinsu.ac.id), <sup>3</sup>[junaidi@uinsu.ac.id](mailto:junaidi@uinsu.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1797 - 1819

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3587>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3587>

Article History:

Received: 17-07-2026

Revised: 29-07-2026

Accepted: 20-08-2026

**Abstract** : Democracy is often viewed as a pathway toward the realization of civil society. In Indonesia, this concept continues to evolve and has become a focal point for Muslim Gen Z individuals navigating the flow of digital information. Within the Islamic political tradition, democracy is understood through principles such as *shūrā* (consultation), *‘adālah* (justice), *amānah* (trust/accountability), legal certainty, and the protection of public rights, as taught in the Qur'an and Sunnah. This study does not aim to measure student support for or opposition to Islamic democracy; rather, it analyzes the reasoning patterns employed to understand the relationship between Islam and democracy. An interpretative-constructivist approach is adopted, viewing the understanding of democracy as a construct shaped by experience, discourse, and reflection. The study integrates Islamic values, public rationality, and contemporary democratic realities, conceptualizing knowledge as the product of a dialogue between religion, reason, and social experience. The research focuses on the mindset of Muslim Gen Z students rather than their political behavior. It is grounded in the values of *\*amānah\**, justice, and equality, serving as a foundation for developing a model of Islamic democratic reasoning relevant to the younger generation. Data were collected through observation, interviews, questionnaires, and literature reviews, utilizing triangulation techniques to gain a comprehensive understanding of how Islamic democratic reasoning is constructed in the digital era.

**Keywords** : reasoning, democracy, sovereignty, rational, relation.

**Abstrak**: Demokrasi sering dipahami sebagai salah satu jalan menuju terwujudnya masyarakat madani. Di Indonesia, konsep ini terus berkembang dan menjadi perhatian Generasi Zoomer Muslim yang hidup di tengah arus informasi digital. Dalam tradisi politik Islam, demokrasi dipahami melalui prinsip *syūrā*, *‘adālah*, *amanah*, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur dukungan atau penolakan mahasiswa terhadap demokrasi Islam, tetapi menganalisis pola nalar yang digunakan dalam memahami hubungan antara Islam dan demokrasi. Pendekatan yang digunakan bersifat interpretatif-konstruktif dengan memandang pemahaman demokrasi sebagai hasil konstruksi pengalaman, diskursus, dan refleksi. Penelitian juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam, rasionalitas publik, dan realitas demokrasi kontemporer sehingga pengetahuan dipahami sebagai hasil dialog antara agama, akal, dan pengalaman sosial. Objek kajian berfokus pada cara berpikir mahasiswa Gen-Z Muslim, bukan perilaku politiknya. Penelitian ini berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan kesetaraan sebagai dasar pengembangan model nalar demokrasi Islami yang relevan bagi generasi muda. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, serta studi pustaka dengan teknik triangulasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi nalar demokrasi Islami di era digital.

**Kata Kunci** : nalar, demokrasi, kedaulatan, rasional, relasi.

## PENDAHULUAN

Sesungguhnya Islam lebih dulu memancangkan sendi-sendi bangunan substansi demokrasi. Tapi rinciannya diserahkan kepada ijtihad para ulama, sesuai dengan dasar-dasar agama, kemaslahatan rakyat, perkembangan hidup menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend

kehidupan masyarakat modernis. Demokrasi Islami, barangkali dapat dianggap sebagai formulasi untuk merelevansikan sistem pembangunan politik Islam yang mengatasi problematika sosial, ekonomi, politik nasional kontemporer dan tanggung jawab untuk ikut membantu mengatasinya. Sekarang ada beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya; penyegaran wawasan ideologi agar mampu membangun sebuah paradigma teologis yang pas untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa, seperti keadilan sosial, pelecahan moral, dan lain sebagainya. Dengan berbekal yang dilandasi demokrasi Islam, kemampuan kontrol yang baik terhadap perkembangan politik nasional dapat terjamin hak dan kewajiban masyarakat.<sup>1</sup>

Adapun substansi yang hakiki dari demokrasi, yang memberikan bentuk dan sistem praktis, seperti pemilihan umum, meminta pendapat rakyat, menegaskan ketetapan mayoritas, multipartai politik, hak minoritas yang bertentangan, kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, otoritas pengadilan dan lain-lainya.

Media sosial menjadi alat utama bagi Generasi Zoomer dalam mengakses informasi. Namun, informasi yang tidak akurat dan berita palsu dapat mempengaruhi pandangan politik mereka. Dalam beberapa kasus, narasi ekstremis dapat menarik perhatian generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pemahaman yang benar tentang Islam dan politik. Dalam beberapa kasus, narasi ekstremis dapat menarik perhatian generasi muda. *Siyasah Islamiyah* adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip politik dalam Islam, termasuk keadilan, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dengan memahami *Siyasah Islamiyah* dapat membantu Generasi Zoomer mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik demokrasi.

Generasi Z (Gen-Z) merupakan kelompok demografis yang lahir dalam rentang sekitar tahun 1997 hingga 2012, generasi yang lahir dalam lanskap sosial yang sangat berbeda. Yaitu, fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari transformasi besar dalam sejarah peradaban manusia, khususnya revolusi digital. Mereka tumbuh dalam dunia yang telah terdigitalisasi (era-digital) yang ditandai oleh penetrasi teknologi informasi yang sangat masif, di mana batas antara realitas fisik dan virtual semakin kabur. Berbeda dengan generasi sebelumnya, kehidupan mereka tidak hanya dipengaruhi oleh globalisasi, tetapi juga oleh digitalisasi yang masif dan penetratif. Gen-Z tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bagian inheren dari ekosistem digital itu sendiri. Dalam konteks ini, Gen-Z tidak hanya menjadi subjek perubahan sosial, tetapi juga agen aktif yang membentuk arah peradaban kontemporer. Teknologi bukan sekadar alat, melainkan telah menjadi struktur yang membentuk kesadaran, identitas, dan relasi sosial.<sup>2</sup>

Realitas ini menjadikan mereka sebagai generasi yang unik dalam sejarah peradaban manusia, terutama dalam aspek pola pikir, interaksi sosial, hingga cara memahami dunia. Dalam perspektif teori sosial Barat, perubahan ini dapat dianalisis melalui konsep *liquid modernity* dari Zygmunt Bauman, yang menekankan bahwa kehidupan modern ditandai oleh ketidakpastian, fleksibilitas, dan fragmentasi identitas.<sup>3</sup> Gen-Z bisa memiliki identitas berbeda di tiap platform digital LinkedIn, Instagram, TikTok yang menunjukkan bahwa identitas bukan lagi sesuatu yang “given”, tetapi “constructed” dan fleksibel. Sedangkan dalam konteks Islam, dinamika ini dapat dibaca sebagai ujian terhadap keseimbangan antara akal (*‘aql*) dan wahyu (*naql*) dalam membimbing kehidupan manusia.

Di Indonesia, Gen-Z memiliki peran strategis karena jumlahnya yang signifikan dalam struktur demografi nasional. Mereka akan menjadi aktor utama dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di masa depan. Sehingga Gen-Z sering disebut sebagai *digital natives*, yakni generasi yang sejak lahir telah akrab dengan teknologi digital. Menurut Rhenald Kasali, generasi ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan teknologi, tetapi juga rentan terhadap distraksi akibat informasi yang berlimpah.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mardian Idris Harahap, “Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholish Madjid”, dalam Jurnal Al-Harakah, Vol. 3 No. 3, (Medan: Jurnal UINSU. 2019), h. 8.

<sup>2</sup>Hadion Wijoyo, et.al., *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0.*, Cet.1, (Banyumas: Pena Persada. 2020), h. 2-6.

<sup>3</sup>Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity*, (Cambridge: Polity Press, 2006), h. 47-54.

<sup>4</sup>Rhenald Kasali, *Disruption: Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*, Cet.13, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 45.

Dialektika antara fakta dan hoaks, selalu muncul dalam perbincangan antar mereka. Gen-Z di-*claim* merupakan produk dari masyarakat jaringan (*network society*) yang membentuk pola pikir dan perilaku mereka secara fundamental. Data menunjukkan bahwa Gen-Z menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang digital, menggunakan media sosial sebagai sarana utama komunikasi dan ekspresi diri. Namun, jika struktur sosial berubah menjadi berbasis jaringan digital, maka individu yang lahir dalam sistem tersebut akan menginternalisasi logika jaringan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Rhenald Kasali menyatakan bahwa disrupsi digital telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi secara radikal. Akan tetapi, tidak semua Gen-Z sepenuhnya terpengaruh oleh teknologi; faktor budaya lokal dan pendidikan juga tetap memainkan peran penting.<sup>5</sup>

Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk *alienasi digital*, di mana individu kehilangan keterhubungan sosial yang autentik karena terlalu terikat pada dunia virtual. Ketika kehidupan digital seseorang dieksploitasi untuk mengambil keuntungan dari aktivitas digital orang tersebut melalui tekanan dan manipulasi, terjadi karena keterasingan digital. Aliensi yang dimaksud adalah perasaan atau kondisi terasing, terisolasi atau terpisah dari diri sendiri, lingkungan sosial maupun hasil pekerjaan. Konsep ini sering dikaitkan dengan pemikiran Karl Marx mengenai buruh yang terasing dari hasil pekerjaannya di bawah sistem kapitalisme.<sup>6</sup> Dalam kerangka teori Barat, teori *hyperreality* dari Jean Baudrillard juga relevan untuk memahami Gen-Z. Dunia digital menciptakan realitas semu yang sering kali lebih dominan daripada realitas nyata. Hal ini terlihat dalam fenomena media sosial, di mana citra diri sering kali dikonstruksi secara artifisial.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif (*interpretive qualitative research*) dengan paradigma konstruktivisme (*constructivist paradigm*), karena objek utama yang dikaji bukanlah perilaku politik mahasiswa, melainkan proses penalaran (*reasoning process*) yang digunakan mahasiswa Generasi Zoomer Muslim dalam membangun pemahamannya mengenai demokrasi Islami. Pendekatan ini dipilih atas dasar bahwa pemahaman mengenai demokrasi tidak dipandang sebagai realitas objektif yang dapat diukur secara tunggal, melainkan sebagai hasil konstruksi makna yang lahir melalui interaksi antara pengalaman individual, nilai-nilai keagamaan, lingkungan akademik, dan ruang komunikasi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak berusaha menguji hubungan kausal sebagaimana lazim dilakukan dalam penelitian positivistik, tetapi berupaya menjelaskan bagaimana suatu pola nalar terbentuk, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam konteks kehidupan mahasiswa Muslim kontemporer.<sup>8</sup>

Paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial bersifat majemuk (*multiple realities*) karena dibentuk melalui pengalaman, bahasa, budaya, dan interaksi sosial yang berbeda pada setiap individu. Oleh sebab itu, konsep demokrasi Islami dalam penelitian ini tidak diasumsikan memiliki satu definisi tunggal, melainkan dipahami sebagai hasil interpretasi yang berkembang melalui proses dialog antara teks-teks keagamaan, argumentasi rasional, pengalaman demokrasi Indonesia, dan pengaruh media digital. Perspektif ini menjelaskan bahwa penelitian kualitatif interpretatif bertujuan memahami makna yang dibangun partisipan terhadap suatu fenomena melalui pengalaman hidup mereka, bukan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>9</sup>

<sup>5</sup>Junaidi, et. al, "Fenomena Fomo dan Perilaku Konsumtif Generasi Z Perspektif Tafsir Misbah", dalam *ALWATZIKHOEBILLAH*, Vol. 12, No. 1, (Sambas: Journal IAISAMBAS, 2026), h. 665-666.

<sup>6</sup>Hariyanto, "Alienasi Digital Di Indonesia: Analisa Pemikiran Karl Marx Dan Dampak Sosial Media Terhadap Alienasi Manusia", dalam *Socius*, Vol.1, No.7, (Jakarta: Yayasan Daarul Huda, 2024), h. 31-33

<sup>7</sup>Ropip Asharudin, "Analisis Pemikiran Jean Baudrillard tentang Simulasi dan Realitas dalam Konteks Era Digital", dalam *Gunung Djati CS*, Vol.24, (Bandung: Gunung Djati Conference Series, 2023), h. 911.

<sup>8</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi & Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 62-63

<sup>9</sup>Jhon W. Creswell, e. al., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Ed. 4.. (New York: Sage Publications. 2018), h. 23-24

Secara operasional, penelitian dilaksanakan melalui desain multi-method qualitative yang mengkombinasikan observasi partisipatif moderat, wawancara mendalam, diskusi kelompok (*focus group discussion*), kuesioner semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Penggunaan berbagai teknik tersebut bukan dimaksudkan sebagai penelitian campuran (*mixed methods*), melainkan sebagai strategi untuk memperoleh kedalaman data melalui triangulasi metode.

Observasi partisipatif digunakan untuk menangkap reasoning in action, yaitu proses argumentasi yang muncul secara spontan dalam interaksi akademik mahasiswa. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali refleksi personal responden mengenai hubungan Islam dan demokrasi, sedangkan diskusi kelompok memungkinkan peneliti mengamati dinamika negosiasi makna yang terbentuk melalui proses deliberatif antarmahasiswa. Di sisi lain, kuesioner semi-terstruktur digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memetakan kecenderungan pola berpikir responden secara lebih luas sebelum dilakukan eksplorasi mendalam melalui observasi dan wawancara. Kombinasi tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur nalar demokrasi Islami pada Generasi Zoomer Muslim.<sup>10</sup>

Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan pertimbangan akademik bahwa mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan reflektif yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Oleh sebab itu, responden dipilih bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena diyakini mampu memberikan data yang kaya mengenai proses penalaran demokrasi Islami.<sup>11</sup>

Khalayak sasaran penelitian adalah mahasiswa Generasi Zoomer Muslim yang sedang menempuh pendidikan pada Program Studi S1 Pemikiran Politik Islam dan S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pemilihan kedua program studi tersebut memiliki justifikasi metodologis yang kuat. Mahasiswa Pemikiran Politik Islam memperoleh landasan teoritis mengenai filsafat politik Islam, demokrasi, syūrā, negara, dan pemikiran politik klasik maupun kontemporer, sedangkan mahasiswa Hukum Tata Negara memiliki pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan, konstitusi, hak asasi manusia, dan praktik demokrasi dalam konteks hukum positif Indonesia. Dengan latar akademik tersebut, kedua kelompok mahasiswa dipandang memiliki kapasitas argumentatif yang memadai untuk merefleksikan hubungan antara Islam dan demokrasi secara lebih mendalam dibandingkan populasi mahasiswa pada umumnya.

Kriteria inklusi responden meliputi empat aspek. Pertama, termasuk kategori Generasi Zoomer yang lahir antara tahun 1997–2012. Kedua, berstatus mahasiswa aktif pada kedua program studi tersebut. Ketiga, bersedia mengikuti seluruh rangkaian penelitian melalui observasi, wawancara, maupun pengisian kuesioner. Keempat, mampu menyampaikan argumentasi secara reflektif mengenai isu demokrasi Islami. Jumlah responden tidak ditentukan berdasarkan perhitungan statistik, tetapi mengikuti prinsip data saturation, yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh mulai menunjukkan pengulangan tema dan tidak lagi menghasilkan kategori konseptual baru.<sup>12</sup>

Keberhasilan penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan dalam menangkap makna yang dibangun oleh partisipan. Oleh karena itu, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), karena hanya peneliti yang mampu melakukan interpretasi, refleksi, dan penyesuaian terhadap dinamika data selama proses penelitian berlangsung. Meskipun demikian, untuk meningkatkan konsistensi pengumpulan data, penelitian ini didukung oleh sejumlah instrumen operasional berupa pedoman observasi partisipatif, pedoman wawancara mendalam, pedoman diskusi kelompok (*FGD*), kuesioner semi-terstruktur berbasis skala Likert dan pertanyaan esai, lembar *field notes*.

Pedoman observasi dirancang untuk merekam dinamika argumentasi mahasiswa dalam situasi akademik yang berlangsung secara alami, terutama bagaimana responden menggunakan

<sup>10</sup>Joseph. A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*, Ed. 2, (California: Sage Publications. 2005), h. 79.

<sup>11</sup>Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, Ed. 3, (New York: Sage Publications. 2015), h. 264–267.

<sup>12</sup>Greg Guest, et. al., *Applied Thematic Analysis*, Ed. 2, (New York: Sage Publications. 2020), h. 61–76.

dalil keagamaan, logika rasional, pengalaman empiris, referensi konstitusional, serta pengalaman digital ketika membangun atau merevisi argumentasinya. Pedoman wawancara berisi pertanyaan terbuka yang bersifat eksploratif sehingga memungkinkan responden menjelaskan proses berpikirnya secara mendalam. Sementara itu, kuesioner semi-terstruktur memadukan 26 butir skala Likert yang mengukur kecenderungan epistemologis, etik-normatif, prosedural, syūrā, kedaulatan, dan literasi digital, dengan enam pertanyaan esai yang digunakan untuk mengungkap struktur argumentasi responden. Dengan desain seperti ini, setiap instrumen tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul data, tetapi juga sebagai mekanisme saling memverifikasi melalui triangulasi sehingga produktivitas data yang dihasilkan menjadi lebih kaya, mendalam.

Strategi methodological triangulation dipilih karena objek penelitian bukan sekadar pendapat atau preferensi politik responden, melainkan proses penalaran (*reasoning process*) yang terbentuk melalui interaksi antara nilai-nilai agama, pengalaman sosial, lingkungan akademik, dan ruang digital. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan berbagai teknik pengumpulan data memungkinkan peneliti memperoleh deskripsi yang lebih kaya sekaligus meningkatkan kredibilitas hasil penelitian melalui proses saling memverifikasi antarsumber data.<sup>13</sup>

Sedangkan observasi diarahkan pada forum-forum akademik yang berlangsung secara natural, seperti diskusi kelas, kajian ilmiah, rapat organisasi mahasiswa, bedah buku, maupun forum ilmiah lainnya. Fokus observasi bukan pada isi pendapat politik mahasiswa, melainkan pada proses argumentasi yang mereka gunakan ketika membahas hubungan antara Islam dan demokrasi. Peneliti mengamati bagaimana responden menggunakan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, argumentasi rasional, pengalaman empiris, prinsip konstitusi, maupun pengalaman digital ketika membangun, mempertahankan, atau merevisi pendapatnya. Dengan demikian, observasi tidak diarahkan untuk mengetahui apakah responden menerima atau menolak demokrasi, tetapi bagaimana mereka sampai pada kesimpulan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap *reasoning in action*, yaitu proses penalaran yang berlangsung secara spontan dalam interaksi sosial sehingga mampu meminimalkan *social desirability bias* yang sering muncul dalam wawancara formal.<sup>14</sup>

Teknik kedua adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dikembangkan dalam bentuk dialog terbuka maupun *focus group discussion* (FGD). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat mengeksplorasi alasan, pengalaman, dan proses berpikir responden secara lebih mendalam. Wawancara kualitatif merupakan percakapan profesional yang bertujuan memahami dunia kehidupan partisipan melalui perspektif mereka sendiri. Dalam penelitian ini, wawancara tidak hanya menggali jawaban normatif mengenai demokrasi Islami, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana responden membangun legitimasi terhadap suatu pandangan, bagaimana mereka menanggapi argumen yang berbeda, serta bagaimana pengalaman akademik maupun media digital memengaruhi perubahan pola pikir mereka. Sementara itu, FGD dimanfaatkan untuk mengamati dinamika deliberatif antarmahasiswa sehingga proses negosiasi makna dapat diamati secara langsung dalam konteks interaksi kelompok.<sup>15</sup>

Instrumen berikutnya adalah kuesioner semi-terstruktur yang berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam kerangka triangulasi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai sumber data utama, penelitian ini memanfaatkan kuesioner untuk memperoleh gambaran awal mengenai kecenderungan pola berpikir responden sekaligus sebagai dasar pemilihan isu yang akan dieksplorasi lebih lanjut melalui wawancara dan

<sup>13</sup>Jhon W. Creswell, et. al., *Qualitative Inquiry and...*, h. 187-190

<sup>14</sup>Mardian Idris Harahap, et.al., (2025), "Ayat-Ayat Tentang Bermusyawarah dalam Al-Qur'an (QS Ali Imran 159, QS Asy Syura 38, Al Baqarah 233)", dalam *JURNAL MUDABBIR*, Vol. 5, No. 2, (Medan: Permapendis SUMUT), h. 1152-1154.

<sup>15</sup>Steinar Kvale, et. al., *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, Ed.2, (California: Sage Publications, 2009), h. 27-31.

observasi. Kuesioner disusun dalam dua bagian, yaitu pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert lima tingkat dan pertanyaan terbuka berbentuk esai. Pertanyaan tertutup digunakan untuk memetakan kecenderungan responden terhadap dimensi epistemologis, etik-normatif, prosedural, syūrā, kedaulatan, dan literasi digital, sedangkan pertanyaan terbuka dimanfaatkan untuk menggali argumentasi yang melandasi pilihan tersebut. Dengan demikian, fungsi utama kuesioner bukan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan membantu mengidentifikasi pola penalaran yang kemudian dianalisis lebih mendalam melalui data kualitatif.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi terhadap berbagai sumber sekunder berupa kitab klasik, buku akademik, artikel jurnal bereputasi, prosiding, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan demokrasi, syūrā, politik Islam, serta literasi digital Gen-Z. Studi dokumentasi dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi kredibilitas, dan sintesis tematik sehingga mampu memperkuat interpretasi terhadap data lapangan. Analisis dokumen ini merupakan teknik penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan Peneliti memperoleh konteks historis, konseptual, dan normatif yang tidak selalu muncul melalui observasi maupun wawancara.

Analisis data dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data dimulai dengan mengikuti prinsip *iterative analysis*, yaitu proses analisis yang berlangsung secara terus-menerus hingga diperoleh kategori konseptual yang stabil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif bukan merupakan tahap akhir penelitian, melainkan berlangsung secara simultan dengan proses pengumpulan data sehingga memungkinkan peneliti melakukan penyempurnaan fokus penelitian berdasarkan temuan lapangan.

Tahap pertama analisis dilakukan melalui *open coding*, yaitu proses mengidentifikasi konsep-konsep penting yang muncul dari hasil observasi, wawancara, FGD, maupun jawaban esai pada kuesioner. Setiap pernyataan responden dianalisis secara rinci untuk menemukan unit-unit makna yang merepresentasikan cara berpikir mengenai demokrasi Islami, seperti konsep *syūrā*, keadilan, amanah, kemaslahatan, hak asasi manusia, kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, pemilu, media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya *axial coding*, pada tahap ini berbagai konsep yang memiliki kedekatan makna disusun menjadi kategori yang lebih besar; orientasi normatif-teologis, orientasi rasional-argumentatif, orientasi integratif, dan orientasi reflektif-digital. Proses tersebut memungkinkan peneliti memahami hubungan antarkategori sehingga struktur penalaran responden mulai terlihat secara sistematis. Tahap terakhir adalah *selective coding*, yaitu proses memilih kategori inti (*core category*) yang mampu menjelaskan keseluruhan fenomena penelitian. Kategori inti tersebut kemudian dikembangkan menjadi gambaran bagaimana mahasiswa mengintegrasikan nilai keislaman, rasionalitas publik, pengalaman empiris, dan literasi digital dalam membangun pemahaman mengenai demokrasi Islami. Dengan demikian, model yang dihasilkan bukan merupakan hasil deduksi teori yang telah ada, melainkan lahir secara induktif dari data lapangan.<sup>16</sup>

Keabsahan data dijamin melalui penerapan triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu, disertai *member checking*<sup>17</sup> dan reflektivitas peneliti. menjelaskan bahwa kualitas penelitian kualitatif diukur melalui empat kriteria utama, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Oleh karena itu, setiap temuan penelitian diverifikasi melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, FGD, kuesioner, dan dokumentasi sehingga interpretasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan struktur penalaran responden.<sup>18</sup>

Adapun, pemilihan pendekatan kualitatif dibandingkan pendekatan kuantitatif didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa tujuan utama penelitian ini bukan mengukur tingkat dukungan terhadap demokrasi atau menguji hubungan antarvariabel, melainkan menjelaskan

<sup>16</sup>Kathy Charmaz, *Constructing Grounded Theory: Practical Guide Through Qualitative Analysis*, (London: Sage Publication, 2006), h. 109–116.

<sup>17</sup>Verifikasi dan Validasi terhadap Identitas Responden; Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Rencana Studi/Kartu Hasil Studi/Dokumentasi lainnya yang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut sesuai dengan ketentuan sampling responden.

<sup>18</sup>Yvonna S. Lincoln, et. al., *Naturalistic Inquiry*, (California: Sage Publication, 1985), h. 289–331.

bagaimana proses penalaran terbentuk. Pendekatan kuantitatif cenderung menghasilkan informasi mengenai frekuensi, korelasi, atau pengaruh antarvariabel, tetapi kurang mampu mengungkap mekanisme epistemologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu keyakinan. Sebaliknya, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami proses negosiasi makna, perubahan argumentasi, serta dinamika interaksi antara agama, rasio, dan realitas sosial yang membentuk nalar demokrasi Islami. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling sesuai untuk menghasilkan model konseptual baru yang tidak hanya menjelaskan apa yang dipikirkan mahasiswa, tetapi juga bagaimana dan mengapa pola penalaran tersebut terbentuk dalam konteks kehidupan Generasi Zoomer Muslim kontemporer.<sup>19</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia pendidikan Indonesia, Gen-Z menuntut pendekatan yang berbeda. Model pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah tidak lagi efektif bagi mereka. Mereka lebih menyukai pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Gen-Z juga memiliki kecenderungan belajar secara mandiri melalui platform digital seperti YouTube, Coursera, dan berbagai aplikasi edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pengetahuan tidak lagi terpusat pada institusi formal. Oleh karena itu, Nadiem Makari dalam gagasannya yaitu konsep *Merdeka Belajar*<sup>20</sup> menekankan pentingnya fleksibilitas dalam sistem pendidikan untuk menyesuaikan dengan karakteristik generasi baru. Namun, kemudahan akses informasi juga menimbulkan masalah baru, yaitu *information overload* dan rendahnya literasi kritis. Gen-Z perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi yang valid dan relevan. Perubahan karakteristik Gen-Z menuntut transformasi dalam sistem pendidikan.

Paulo Freire mengkritik model pendidikan tradisional sebagai *banking system*, di mana siswa hanya menjadi penerima pasif informasi. Sementara Gen-Z membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih dialogis dan partisipatif. *Banking system*, seperti layaknya menabung di bank, dianalogi seperti tenaga pengajar menyampaikan pernyataan-pernyataan pembelajaran sebagai tabungan sedangkan anak didik hanya menerima pernyataan tersebut sebagai *banking*. Kegiatan ruang gerak yang disediakan bagi tenaga pendidik dan anak didik, hanya terbatas pada memberi, mencatat dan menyimpan.<sup>21</sup> Hal serupa juga yang disampiakan oleh Ibn Khaldun menekankan pendidikan tidak hanya bertujuan transfer ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak menekankan pentingnya pengalaman dan pembiasaan dalam proses belajar. Bahwa moralitas dan karakter manusia dibentuk melalui interaksi sosial, budaya dan lingkungan.<sup>22</sup>

Model pendidikan konvensional tidak lagi efektif bagi Gen-Z, karena Gen-Z lebih tertarik pada pembelajaran berbasis teknologi dalam berinteraksi. Alih-alih metode pembelajaran dilakukan secara jaringan (*daring*). Akan tetapi, Metode pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019-2024), Nadiem Makarim melalui konsep *Merdeka Belajar* menekankan fleksibilitas dan kreativitas dalam pendidikan. Namun, tidak semua teknologi pendidikan efektif; kualitas konten tetap menjadi faktor utama. Kemendikbud kala itu, melaporkan tenaga pendidik bergerak cepat mencari solusi dalam penerapan *Merdeka Belajar*, agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti (*stug*).

<sup>19</sup>Jhon W. Creswell, e. al., *Qualitative Inquiry and Research...*, h. 41–45; Lihat juga, Joseph. A. Maxwell, *Qualitative Research Design...*, h. pp. 29–33.

<sup>20</sup>Adalah program kebijakan Kemendikbudristek RI (2021-2024), Kemendikbud RI (2019-2021), yang digagas Nadiem Makarim untuk menciptakan pendidikan berkualitas dengan memberi kebebasan berpikir dan berekspresi bagi anak didik serta tenaga pendidik. Demi memenuhi kebutuhan standart pendidikan nasional sebanding dengan memenuhi kehendak ekspresi anak didik.

<sup>21</sup>Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Terj. Mansour Fakhri dkk, Ed. Imam Ahmad, Cet. 1, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 50-51.

<sup>22</sup>Terdapat pada karyanya Ibn Khaldun yang terdiri 7 jilid berjudul *Kitab al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar*. Yaitu pada jilid 1 berjudul *Muqodimmah*, pada jilid tersebut membahas *Assabiyyah (arab)*, sebuah konsep solidaritas sosial dengan penekanan kesatuan, kesadaran, satu tujuan dalam sosial pendidikan dan pembentukan akhlak adalah pemikiran Ibnu Khaldun.

Sedangkan dalam aspek religiusitas, Gen-Z menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih individual dalam memahami agama dan tidak terlalu terikat pada otoritas tradisional. Dalam kajian sosiologi agama, terdapat dua tesis besar: sekularisasi dan kebangkitan agama. Gen-Z berada di antara dua arus tersebut. Dalam konteks ini, identitas bukan lagi sesuatu yang diwariskan, tetapi dikonstruksi secara terus-menerus. Hal ini menciptakan kebebasan sekaligus kecemasan eksistensial. Namun, di tengah arus sekularisasi dan digitalisasi, terdapat juga fenomena kebangkitan religiusitas di kalangan Gen-Z, terutama melalui media sosial. Dakwah digital menjadi salah satu sarana penting dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Dan sebagian dari Gen-Z tetap mencari stabilitas melalui agama dan komunitas lokal.

Menurut Komaruddin Hidayat (Mantan Rektor UIN-Jakarta), generasi muda saat ini mengalami transformasi spiritualitas, dari yang bersifat institusional menjadi lebih personal dan reflektif. Religiusitas Gen-Z mengalami transformasi dari institusional ke personal. Banyak Gen-Z yang lebih memilih memahami agama secara individual melalui media digital. Akses informasi yang luas memungkinkan individu membangun interpretasi sendiri terhadap agama. Oleh karena itu, Komaruddin menyebutkan bahwa spiritualitas modern cenderung lebih personal dan reflektif. Namun, otoritas keagamaan tetap penting untuk menjaga keotentikan ajaran.<sup>23</sup> Dalam Islam, fenomena ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Dakwah digital membuka akses luas terhadap ajaran Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan distorsi pemahaman (*tahriḥ*).

Oleh karena itu, dakwah digital membuka peluang yang sangat luas bagi penyebaran ajaran Islam kepada Gen-Z melalui berbagai platform digital. Namun, keterbukaan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan berupa distorsi *tahriḥ*, karena informasi keagamaan dapat diproduksi, dipotong, disederhanakan, bahkan dimanipulasi tanpa mekanisme otoritas keilmuan yang memadai. Hal ini dapat diintegrasikan dalam kerangka *Wahdah al-'Ulūm* (Wahadatul Ulum), kondisi ini menunjukkan pentingnya integrasi antara literasi digital, kedalaman ilmu keislaman, dan pembentukan karakter ulul ilmi agar mahasiswa tidak hanya mampu mengakses informasi keagamaan, tetapi juga mampu memverifikasi, mengkritisi, dan menempatkan setiap informasi sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, Sunnah, dan tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, teknologi digital diposisikan sebagai instrumen yang mengantarkan manusia semakin dekat kepada nilai-nilai Ilahiah, yang harus dikendalikan oleh nilai-nilai etik Islam, bukan sebaliknya.<sup>24</sup>

Dalam perspektif Wahdatul 'Ulum UIN-SU, perkembangan media digital tidak dipahami sebagai ancaman terhadap dakwah, tetapi sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang harus diintegrasikan dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak. Paradigma Wahdatul 'Ulum dibangun di atas keyakinan bahwa seluruh ilmu berasal dari Allah dan karena itu tidak boleh dipisahkan dari dimensi ketuhanan, moralitas, serta kemaslahatan manusia. Pengembangan ilmu bukan sekadar proses transfer informasi, melainkan proses integrasi antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang seluruhnya berorientasi pada tauhid.<sup>25</sup>

Dakwah digital sebenarnya merupakan peluang besar bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara untuk memperluas akses terhadap pengetahuan Islam. Melalui TikTok, Instagram, YouTube, maupun platform digital lainnya, mahasiswa dapat mempelajari konsep-konsep seperti *syūrā*, *'adalah*, *amānah*, dan *mashlahah* secara lebih cepat dan mudah dibandingkan melalui media konvensional. Akan tetapi, paradigma Wahdatul 'Ulum mengingatkan bahwa kemudahan memperoleh informasi tidak identik dengan memperoleh ilmu yang benar. Bahwa kesalahan dalam mendudukkan epistemologi ilmu akan menyebabkan manusia kehilangan kesadaran spiritual, memisahkan ilmu dari sumbernya (Allah), dan akhirnya menganggap dirinya sebagai pusat kebenaran. Ketika ilmu dilepaskan dari dimensi sakral tersebut, lahirlah cara berpikir yang materialistik, positivistik, dan antroposentris sehingga ilmu kehilangan orientasi etik dan spiritualnya.

<sup>23</sup>Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama*, (Jakarta: Mizan, 2015), h. 71.

<sup>24</sup>Syahrin Harahap, et. al., *Wahdatul 'Ulūm: Paradigma Pengembangan Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (Medan: IAIN Press, 2019), h. 6-8.

<sup>25</sup>Syahrin Harahap, et. al., *Wahdatul 'Ulūm: Paradigma...*, h. 15-16

Dalam konteks media digital, kondisi tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk distorsi pemahaman (tahrif epistemologis). Distorsi tidak selalu berarti perubahan teks Al-Qur'an atau hadis, tetapi juga penyempitan makna ajaran Islam melalui penyajian informasi yang parsial, terpotong, sensasional, atau dilepaskan dari konteks keilmuannya. Misalnya, konsep *syūrā* direduksi hanya menjadi "voting mayoritas", atau konsep *'adalah* dipersempit menjadi "persamaan hak" tanpa memperhatikan dimensi *maqāshid al-syarī'ah* dan tanggung jawab moral yang menjadi dasar pemikiran politik Islam. Dengan kata lain, yang mengalami distorsi bukan teks wahyu, melainkan cara memahami wahyu, inilah yang dimaksud oleh civitas akademik UIN-SU. Karena *syūrā* dalam al-Qur'an menjelaskan konsep demokrasi yang bermusyawarah (deliberatif): terdapat pada QS. *As-Syūrā: 38*:...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ... dan QS. *Ali Imran: 159*:...لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ...<sup>26</sup>.

Dalam penelitian ini, prinsip tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan bahwa mahasiswa UINSU tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengakses konten dakwah digital, tetapi juga harus memiliki literasi digital kritis, yaitu kemampuan memverifikasi sumber, memahami konteks keilmuan, membandingkan berbagai pandangan ulama, serta membedakan antara nilai-nilai demokrasi Islami yang substantif dengan narasi politik yang menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat legitimasi. Dengan demikian, ancaman utama dakwah digital bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan antara informasi keagamaan dengan tradisi keilmuan Islam yang menjadi fondasi paradigma Wahdatul 'Ulum.

Kemudahan memperoleh informasi melalui internet juga menghadirkan persoalan baru berupa information overload dan digital alienation. Bagi mahasiswa UINSU, banjir informasi menyebabkan mereka menerima begitu banyak konten dalam waktu singkat sehingga kapasitas untuk melakukan refleksi mendalam semakin berkurang. Dalam kondisi seperti ini, nalar demokrasi Islami berisiko terbentuk secara dangkal: mahasiswa mengetahui istilah demokrasi, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, atau pemilu, tetapi belum tentu memahami landasan filosofis dan normatifnya dalam tradisi politik Islam.

Wahdatul 'Ulum menawarkan solusi epistemologis terhadap persoalan tersebut dengan mengembalikan proses belajar kepada prinsip tadabbur, verifikasi ilmiah, dan keterhubungan antara ilmu dengan sumber ilahiah. Paradigma ini menolak pemahaman yang serba instan dan menuntut mahasiswa untuk menempatkan informasi digital dalam kerangka keilmuan yang lebih luas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, karakter Zoomer yang terbiasa dengan kecepatan informasi harus diarahkan agar tidak berhenti pada konsumsi data, tetapi berkembang menjadi kemampuan menimbang, menguji, dan menghubungkan informasi dengan nilai-nilai Islam.

Dalam dimensi reflektif proses ini, manusia yang beragama harus memiliki kesadaran akan keterbatasan diri, kesediaan untuk mendengar, dan keberanian untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai. Demokrasi, dalam pengertian ini, bukan sekadar prosedur politik, melainkan latihan kebijaksanaan publik yang menuntut kedewasaan batin. Karena itu, mahasiswa UINSU perlu membedakan antara informasi yang viral dan pengetahuan yang benar, antara opini yang populer dan argumentasi yang sah, serta antara simbol keagamaan dan substansi nilai yang dikandungnya.

Media sosial telah memperluas ruang interaksi sosial sehingga memungkinkan terbentuknya komunitas virtual lintas wilayah, budaya, dan organisasi. Namun demikian, komunikasi digital juga menghadirkan tantangan berupa polarisasi politik, konflik identitas, ujaran kebencian, dan menurunnya kualitas dialog yang konstruktif. Dalam konteks ini, karakter Generasi Zoomer yang sangat partisipatif dapat menjadi kekuatan sekaligus risiko: mereka mudah terlibat dalam percakapan publik, tetapi juga mudah terseret dalam perdebatan yang emosional dan fragmentatif.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Mardian Idris Harahap, et.al., (2025), "Ayat-Ayat Tentang...", h. 1152–1154.

<sup>27</sup>Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama...*, h. 109–116.

Bagi mahasiswa UINSU, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi publik. Prinsip *ukhuwwah*, *tasāmuḥ*, *ta'wun*, dan adab *al-ikhtilāf* merupakan fondasi moral yang menjaga agar proses demokrasi tidak berubah menjadi arena permusuhan. Dalam kerangka Wahdatul 'Ulum, ilmu tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan adab. Integrasi etik dalam paradigma UINSU menegaskan bahwa kecerdasan intelektual harus berjalan seiring dengan kematangan moral, sehingga mahasiswa tidak hanya mampu berargumentasi, tetapi juga mampu menjaga kehormatan pihak lain dalam perbedaan pandangan.<sup>28</sup>

Dialog sebagai inti kehidupan beragama dan berbangsa, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang meniadakan perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa, santun, dan produktif. Dalam sintesis pemikirannya, perbedaan bukan ancaman, melainkan ruang pembelajaran untuk memperluas wawasan dan memperdalam kebijaksanaan. Oleh karena itu, mahasiswa UINSU sebagai Generasi Zoomer Muslim perlu memiliki kemampuan berdialog secara rasional, menyampaikan kritik secara santun, dan menerima keberagaman pendapat tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman.

### 1. Analisis Mekanisme Pembentukan Nalar Demokrasi Islami Generasi Zoomer Muslim

Proses konseptual pembentukan nalar dalam penelitian ini dibangun melalui integrasi antara literasi keislaman, literasi demokrasi, dan literasi digital yang kemudian dianalisis secara empiris berdasarkan pemaknaan mahasiswa Generasi Zoomer Muslim di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kerangka ini tidak menggambarkan hubungan sebab-akibat yang bersifat linear, melainkan suatu proses konstruksi makna yang berkembang melalui interaksi antara nilai-nilai normatif Islam, prinsip-prinsip demokrasi modern, dan pengalaman sosial di ruang digital. Dengan demikian, nalar dipahami sebagai kemampuan individu memperoleh, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara kritis sehingga membentuk cara berpikir, sikap, dan pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca informasi, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai agama, politik, dan realitas sosial yang menjadi fondasi epistemologis bagi terbentuknya orientasi berpikir Generasi Zoomer Muslim.

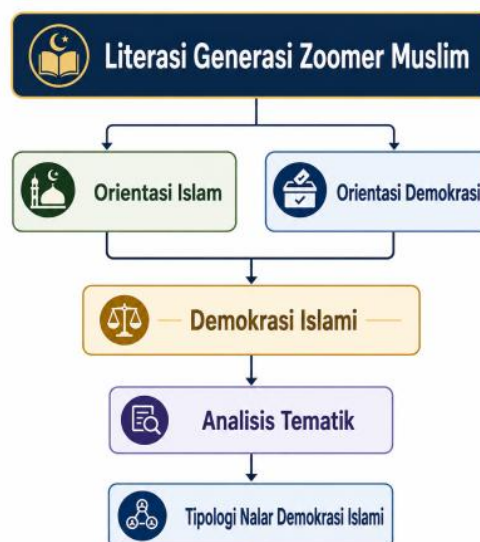


Diagram 1: Alur Mekanisme Pembentukan Nalar

Tahap pertama pembentukan nalar dimulai dari literasi Generasi Zoomer Muslim. Literasi dipahami sebagai kemampuan membaca realitas sosial, memahami wacana keagamaan,

<sup>28</sup>Syahrin Harahap, et. al., *Wahdatul 'Ulūm: Paradigma...*, h. 21.

menafsirkan dinamika politik, dan menyaring informasi digital secara kritis. Karakteristik Generasi Z yang hidup dalam lingkungan informasi yang cepat, terbuka, dan penuh kontestasi menjadikan literasi sebagai prasyarat utama dalam membangun penalaran demokrasi Islami. Kemampuan tersebut menentukan apakah seseorang menerima informasi secara pasif atau melakukan proses refleksi dan evaluasi sebelum membentuk suatu keyakinan.

Selanjutnya, literasi berkembang menjadi dua orientasi utama, yaitu Orientasi Islam dan Orientasi Demokrasi. Orientasi Islam merujuk pada pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur'an* yang menempatkan Islam sebagai sistem nilai yang berlandaskan *'adālah*, *syūrā*, *amānah*, dan *mashlahah*. Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman etika dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, sementara musyawarah menjadi mekanisme partisipatif yang menolak otoritarianisme dan membuka ruang bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam konteks Generasi Zoomer, orientasi ini tercermin ketika mahasiswa menilai pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, dan kemaslahatan publik, bukan semata-mata identitas agama atau kepentingan politik sesaat.<sup>29</sup>

Di sisi lain, Orientasi Demokrasi mengacu pada pemikiran Jimly Asshiddiqie dalam *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* yang memandang demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, negara hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi tidak cukup dipahami sebagai prosedur pemilihan umum, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances*, akuntabilitas, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi konstitusional yang menggabungkan partisipasi rakyat dengan pembatasan kekuasaan agar tidak berkembang menjadi tirani mayoritas.<sup>30</sup>

Interaksi antara kedua orientasi tersebut melahirkan konsep Demokrasi Islami, yaitu sintesis antara nilai-nilai etika Islam dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dalam kerangka ini, Islam diposisikan sebagai sumber nilai moral, sedangkan demokrasi menjadi mekanisme politik untuk mewujudkan nilai tersebut dalam kehidupan bernegara. Demokrasi Islami bukan merupakan bentuk teokrasi yang menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada otoritas agama, maupun sekularisme yang memisahkan agama dari ruang publik. Sebaliknya, demokrasi dipahami sebagai sistem politik yang dijalankan dalam bingkai keadilan, amanah, musyawarah, kemaslahatan, konstitusionalisme, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, demokrasi menjadi tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pada etika publik.

Jika kita tarik lurus ke sosiologi pendidikan, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan *habitus* intelektual. Melalui proses pembelajaran, mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyusun argumentasi ilmiah, serta menghubungkan teori dengan realitas sosial. Dalam penelitian ini, latar belakang akademik responden menjadi penting karena mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam dan Hukum Tata Negara memperoleh pemahaman mengenai demokrasi, konstitusi, hak asasi manusia, syariat Islam, dan pemikiran politik Islam. Oleh karena itu, pandangan mereka merupakan hasil interaksi antara pembelajaran formal, diskusi akademik,

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 1992), h. 24–48.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 20–28.

bacaan ilmiah, dan pengalaman kampus. Di sisi lain, Generasi Z tumbuh dalam ekosistem digital yang menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi politik dan keagamaan, sehingga membentuk cara berpikir yang lebih terbuka sekaligus rentan terhadap polarisasi. Kondisi ini menjadikan kajian mengenai demokrasi Islami semakin relevan karena perdebatan tentang hubungan demokrasi dan Islam kini tidak hanya berlangsung di ruang akademik, tetapi juga berkembang secara intensif di ruang digital.<sup>31</sup>

Dalam mengkaji konstruksi nalar politik Mahasiswa Generasi Zoomer (Gen-Z) Muslim, memahami demokrasi Islami di tengah transformasi sosial-politik pada era digital. Fokus penelitian tidak diarahkan untuk mengukur tingkat persetujuan atau penolakan responden terhadap demokrasi sebagai pilihan politik, melainkan menelusuri proses berpikir (*reasoning process*) yang membentuk cara mereka memahami relasi antara Islam, demokrasi, kedaulatan rakyat, kedaulatan Tuhan, *syūrā*, partisipasi politik, dan pengaruh media digital terhadap pembentukan kesadaran politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi opini, tetapi berupaya mengungkap mekanisme epistemologis yang melandasi lahirnya argumentasi responden, termasuk nilai-nilai yang mereka gunakan dalam menilai demokrasi, cara memadukan argumentasi keagamaan dengan rasionalitas publik, serta bagaimana ruang digital memengaruhi pembentukan nalar politik mereka.

Karakter tersebut menempatkan penelitian ini dalam paradigma kualitatif interpretatif yang didukung oleh data kuantitatif deskriptif. Analisis utama dilakukan melalui analisis tematik, sedangkan data skala Likert digunakan untuk memetakan kecenderungan umum responden. Sebaliknya, jawaban esai, hasil observasi, dan forum diskusi dimanfaatkan untuk menggali argumentasi, pola berpikir, serta konstruksi makna yang tidak dapat dijelaskan melalui angka semata. Seluruh sumber data diperlakukan sebagai *complementary evidence*, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembentukan nalar demokrasi Islami pada mahasiswa Gen-Z Muslim.<sup>32</sup>

Penelitian ini melibatkan 22 responden yang seluruhnya merupakan mahasiswa Program Studi S1 Pemikiran Politik Islam dan S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan komposisi seimbang masing-masing 11 responden dari setiap program studi. Mayoritas responden berasal dari angkatan 2022 dan berada pada rentang usia 21–23 tahun, sehingga secara demografis merepresentasikan Generasi Zoomer yang sedang memasuki fase pembentukan identitas intelektual, sosial, dan politik. Keseragaman angkatan juga memberikan keuntungan metodologis karena responden memperoleh kurikulum, lingkungan akademik, dan pengalaman pembelajaran yang relatif sama, sehingga variasi jawaban lebih merefleksikan perbedaan cara bernalar daripada perbedaan pengalaman akademik akibat perubahan kurikulum.

Jumlah responden ditetapkan berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), bukan semata-mata pada ukuran sampel. Selama proses pengumpulan data, jawaban responden menunjukkan pola argumentasi yang semakin berulang tanpa menghasilkan kategori atau tema baru yang relevan. Meskipun terdapat variasi dalam cara mengemukakan pendapat, substansi pemikiran yang muncul tetap berada dalam spektrum tema yang sama, seperti *syūrā*, keadilan, amanah, kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan pengaruh media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan responden diperkirakan hanya menghasilkan

<sup>31</sup> Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, Terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2010), h. 2-7

<sup>32</sup> Heriyanto, "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif", dalam *Anuva*, Vol. 2, No. 3, (Semarang: E-Journal Undip. 2018), h. 320–324

pengulangan informasi tanpa memperkaya konstruksi analitis yang telah terbentuk. Oleh karena itu, 22 responden dinilai memadai untuk merepresentasikan variasi nalar demokrasi Islami sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>33</sup>

Secara metodologis, pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik responden terhadap fokus penelitian. Seluruh responden berasal dari dua program studi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kajian politik Islam dan ketatanegaraan, sehingga memiliki bekal konseptual mengenai demokrasi, hukum tata negara, konstitusi, *syūrā*, hak asasi manusia, serta pemikiran politik Islam klasik maupun kontemporer. Dengan demikian, jawaban yang diberikan tidak dipahami sebagai opini spontan, tetapi sebagai hasil interaksi antara pembelajaran formal, pengalaman akademik, literasi digital, pengalaman organisasi, serta refleksi terhadap dinamika sosial-politik yang berkembang.<sup>34</sup>

Komposisi yang seimbang antara kedua program studi juga merupakan pertimbangan metodologis yang penting. Mahasiswa Pemikiran Politik Islam umumnya memiliki orientasi yang lebih kuat pada aspek normatif-filosofis, seperti teori negara Islam, sejarah politik Islam, dan pemikiran para intelektual Muslim. Sebaliknya, mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) lebih banyak berinteraksi dengan isu konstitusi, sistem pemerintahan, hukum publik, dan praktik ketatanegaraan modern. Pertemuan kedua perspektif tersebut memberikan ruang dialog yang memungkinkan munculnya variasi nalar politik tanpa keluar dari rumpun keilmuan yang sama, yaitu politik ketatanegaraan Islam. Oleh karena itu, keseimbangan komposisi responden tidak hanya meningkatkan objektivitas penelitian, tetapi juga memperkaya analisis mengenai bagaimana latar belakang akademik memengaruhi cara mahasiswa mengonstruksi hubungan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi modern.

Karakteristik responden dalam penelitian ini tidak diposisikan sekadar sebagai informasi demografis, melainkan sebagai konteks sosial yang membentuk proses penalaran politik. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, pendidikan formal merupakan salah satu institusi utama yang memengaruhi cara individu memahami realitas sosial dan politik. Karena itu, perbedaan orientasi akademik dipandang sebagai faktor kontekstual yang membantu menjelaskan mengapa sebagian responden melihat demokrasi Islami sebagai sistem yang kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam, sementara sebagian lainnya lebih menekankan adanya perbedaan filosofis antara demokrasi modern dan sistem politik Islam. Dengan demikian, karakteristik responden menjadi landasan analitis yang penting untuk memahami mekanisme pembentukan nalar demokrasi Islami, sekaligus menjadi pijakan dalam penyusunan model Nalar Generasi Zoomer Muslim terhadap Demokrasi Islami yang dikembangkan pada bagian selanjutnya.

Karakteristik usia responden menunjukkan bahwa seluruh partisipan berada pada rentang **21–25 tahun**, dengan dominasi usia **22 tahun (40,9%)**, diikuti usia **21 tahun (36,4%)**, usia **23 tahun (18,2%)**, dan usia **25 tahun (4,5%)**. Komposisi ini menegaskan bahwa mayoritas responden berada pada fase *emerging adulthood* (dewasa awal), yaitu periode transisi ketika individu mulai membangun identitas intelektual, sosial, politik, dan ideologis secara lebih mandiri. Pada fase ini, individu tidak lagi sekadar menerima nilai-nilai yang diperoleh dari keluarga atau institusi pendidikan, tetapi mulai mengevaluasi, membandingkan, dan merekonstruksi berbagai sistem nilai berdasarkan pengalaman, refleksi, dan argumentasi yang mereka bangun sendiri. Oleh karena itu, pandangan responden mengenai demokrasi Islami dipahami sebagai proses

<sup>33</sup> Greg Guest, *Applied Thematic Analysis...*, h. 61–76.

<sup>34</sup>Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation...*, h. 264–267

intelektual yang masih berkembang, bukan sebagai keyakinan yang bersifat final dan tertutup terhadap perubahan.<sup>35</sup>

Karakteristik tersebut menjadi relevan dengan tujuan penelitian karena Generasi Zoomer tumbuh pada saat teknologi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mengalami proses adaptasi terhadap internet, Gen-Z lahir dalam lingkungan yang sejak awal dipenuhi media sosial, mesin pencari, platform video, dan berbagai bentuk komunikasi digital. Akibatnya, proses pembentukan pengetahuan, identitas politik, maupun pemahaman keagamaan berlangsung dalam ruang informasi yang sangat terbuka, cepat, dan dinamis. Demokrasi, politik Islam, hak asasi manusia, maupun isu-isu global tidak lagi diperoleh melalui ruang kelas atau organisasi formal semata, tetapi juga melalui interaksi yang intensif dengan berbagai narasi di ruang digital. Kondisi ini menjadikan nalar demokrasi Islami mahasiswa Gen-Z bersifat lebih dinamis, reflektif, dan terbuka terhadap reinterpretasi sesuai dengan perkembangan informasi yang mereka terima.

Selain usia, penelitian ini juga mempertimbangkan pengalaman organisasi sebagai salah satu indikator pembentukan literasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **10 responden (45,5%)** aktif dalam organisasi, sedangkan **12 responden (54,5%)** menyatakan tidak aktif. Organisasi yang diikuti meliputi organisasi kemahasiswaan internal maupun organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Meskipun demikian, distribusi tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas responden justru tidak aktif dalam organisasi formal.<sup>36</sup>

Temuan ini menunjukkan adanya transformasi ruang sosialisasi politik pada Generasi Zoomer. Jika pada generasi sebelumnya organisasi kemahasiswaan menjadi arena utama pembentukan kesadaran politik dan kepemimpinan, maka pada Gen-Z fungsi tersebut mulai bergeser menuju ruang digital. Menariknya, responden yang tidak aktif berorganisasi tetap mampu menyampaikan argumentasi yang relatif kompleks mengenai hubungan antara demokrasi dan Islam, konsep *syūrā*, relasi antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat, serta prinsip keadilan dan partisipasi politik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan bernalar politik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengalaman organisasi, melainkan berkembang melalui akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi digital.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media digital telah menjadi arena baru bagi proses sosialisasi politik dan keagamaan. Platform media sosial, kanal video, podcast, forum diskusi daring, serta berbagai media digital lainnya memungkinkan mahasiswa memperoleh informasi, mengikuti perdebatan publik, dan membangun argumentasi politik secara lebih mandiri. Dengan demikian, pembentukan nalar politik pada Gen-Z tidak lagi bersifat institusional, tetapi semakin berbentuk jaringan pengetahuan digital (*networked knowledge*), di mana proses belajar berlangsung melalui interaksi dengan beragam sumber informasi yang memiliki orientasi ideologis dan epistemologis yang berbeda.

Temuan penelitian semakin memperkuat kecenderungan tersebut melalui jawaban esai responden. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai demokrasi, politik Islam, dan isu-isu kenegaraan melalui media sosial, kemudian melakukan proses verifikasi dengan membaca buku, mengikuti kajian ilmiah, berdiskusi dengan dosen, maupun berdialog dengan tokoh agama. Pola ini menunjukkan bahwa media digital tidak diterima secara pasif sebagai sumber kebenaran, tetapi berfungsi sebagai titik awal pencarian

<sup>35</sup> Jeffrey Jensen Arnett, *Emerging Adulthood: The Winding Road From the Late Teens Through The Twenties*, (New York: Oxford University Press, 2004), h. 8-14.

<sup>36</sup> Kuesioner: *Penelitian Literasi Mahasiswa Gen-Z tentang Demokrasi Islami di UIN-Sumatera Utara*, 2026.

informasi yang kemudian dikonfirmasi melalui sumber-sumber akademik dan keagamaan yang dianggap lebih kredibel. Dengan kata lain, ruang digital tidak menggantikan proses pembelajaran formal, melainkan memperluas ruang refleksi dan argumentasi mahasiswa dalam memahami persoalan demokrasi Islami.

Implikasi metodologis dari temuan tersebut adalah bahwa konstruksi nalar demokrasi Islami pada mahasiswa Gen-Z merupakan hasil interaksi antara pendidikan formal, pengalaman sosial, pengalaman organisasi, dan literasi digital. Keempat unsur tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling melengkapi dalam membentuk cara responden memahami hubungan antara Islam dan demokrasi. Pendidikan formal menyediakan kerangka konseptual dan teoritis, pengalaman organisasi memperkaya praktik deliberasi dan kepemimpinan, sedangkan literasi digital memperluas akses terhadap beragam perspektif yang mendorong proses refleksi, verifikasi, dan negosiasi makna. Interaksi ketiga ruang tersebut menghasilkan pola penalaran yang lebih kompleks dibandingkan jika hanya dijelaskan melalui salah satu faktor secara terpisah.

Secara keseluruhan, karakteristik responden penelitian ini melibatkan mahasiswa Muslim yang berada pada fase intelektual produktif, memiliki latar belakang akademik yang relevan dengan politik Islam dan hukum tata negara, serta hidup dalam ekosistem digital yang sangat intensif. Oleh karena itu, nalar demokrasi Islami yang muncul dalam penelitian ini dipahami bukan sebagai refleksi dari satu sumber pengetahuan tertentu, melainkan sebagai hasil dialog yang berkelanjutan antara nilai-nilai Islam, pengalaman akademik, dinamika sosial, dan arus informasi digital. Temuan ini menjadi landasan penting bagi analisis pada bagian berikutnya, yaitu penyusunan Tipologi Nalar Demokrasi Islami. Model tersebut menjelaskan bahwa pembentukan nalar politik Gen-Z berlangsung melalui proses negosiasi antara otoritas keagamaan, rasionalitas publik, dan pengalaman digital, sehingga menghasilkan pola berpikir yang kontekstual, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan sosial kontemporer.

## 2. Konstruksi Nalar Politik Generasi Zoomer Muslim Tentang Demokrasi Islami Di Era Digital

Latar belakang akademik responden memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan nalar demokrasi Islami. Pendidikan pada bidang Pemikiran Politik Islam dan Hukum Tata Negara (Siyasah) membekali mahasiswa dengan kerangka konseptual yang memadai untuk memahami isu-isu demokrasi melalui perspektif politik Islam, hukum ketatanegaraan, dan nilai-nilai normatif Islam. Hal ini tercermin dari kemampuan responden mengaitkan konsep *syūrā*, *al-'adl*, *mashlahah*, konstitusi, dan partisipasi politik dalam menjelaskan hubungan antara Islam dan demokrasi. Menariknya, kesamaan latar belakang akademik tidak menghasilkan keseragaman pandangan. Sebagian responden menempatkan *syūrā* sebagai fondasi normatif demokrasi Islami, sementara yang lain lebih menekankan keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak masyarakat, atau akuntabilitas pemerintahan. Variasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak membentuk cara berpikir yang homogen, melainkan menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan interpretasi yang kritis dan mandiri.

Pengalaman akademik juga mendorong berkembangnya **nalar argumentatif**, yaitu kecenderungan mahasiswa untuk tidak sekadar menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap demokrasi Islami, tetapi menyusun argumentasi yang memadukan landasan normatif keagamaan dengan pertimbangan rasional. Selain itu, pembentukan nalar tidak berlangsung secara eksklusif di ruang kelas, melainkan melalui interaksi antara pembelajaran formal, pengalaman organisasi, literasi digital, dan refleksi keagamaan. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori politik Islam dari literatur akademik, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik demokrasi kontemporer, dinamika politik nasional, dan diskursus global yang berkembang di ruang digital. Hasil observasi dan FGD selama Maret–April 2026 memperkuat temuan tersebut. Observasi menunjukkan bahwa latar belakang studi politik Islam memperkuat

penggunaan konsep *syūrū* dan keadilan sebagai dasar **nalar normatif**, pendidikan formal membentuk **nalar argumentatif**, integrasi materi perkuliahan dengan isu kontemporer melahirkan **nalar integratif**, sedangkan pemanfaatan sumber digital memperkuat **nalar reflektif**.<sup>37</sup>

Kerangka analisis coding berpedoman pada Proses *Open Coding*, *Axial Coding* dan *Selective Coding* terdapat hasil temuan atas Kuesioner: *Penelitian Literasi Mahasiswa Gen-Z tentang Demokrasi Islami di UIN-Sumatera Utara*, 2026.

1. Open Coding (Identifikasi Kode Awal) terhadap Jawaban Essay Responden, ditemukan tema: Syura, Keadilan, Amanah, Kemaslahatan, Kedaulatan Allah, Pemilu, Voting, HAM, Kritik Pemerintah, Media Sosial.
2. Bila hasil identifikasi temuan tema essay dikonfigurasi ke *Axial Coding*: Pengelompokan Kode ke dalam Katagori Penalaran<sup>38</sup>), maka akan menghasilkan tabulasi berikut:

Tabel 1: Hasil Identifikasi Axial Coding

| Katagori Nalar     | Coding Tema (Jawaban Terbuka)        | Mean Dimensi (Jawaban Tertutup)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nalar Normatif     | Syura,<br>Kedaulatan Allah           | Nilai-nilai Islam = 4,23 (Setuju)<br>harus sesuai Islam = 3,77<br>Musyawarah penting = 4,27 (Setuju)<br>Kedaulatan Tuhan = 4,18 (Setuju)<br>Agama dan Rakyat ber-iringan = 3,95                                                                                                                  |
| Nalar Argumentatif | Keadilan,<br>Kemaslahatan,<br>HAM    | Mempertimbangkan logika = 4,23 (Setuju)<br>Terbuka pandangan = 4,36 (Setuju)<br>Mayoritas tidak selalu benar = 3,95<br>Melindungi minoritas = 4,14 (Setuju)<br>Kemaslahatan = 3,76<br>Argumen lebih penting = 3,68<br>Kritik terhadap pemimpin = 3,68                                            |
| Nalar Integratif   | Amanah,<br>Pemilu,<br>Voting,<br>HAM | tokoh agama memengaruhi = 3,59<br>menjamin keadilan = 4,18<br>Pemilu = 3,91<br>Voting = 3,77<br>tidak harus mufakat = 2,64 (Tidak Setuju)<br>diterapkan dalam Islam = 3,91<br>Keputusan melalui diskusi = 4,18 (Setuju)<br>Memilih pemimpin = 4,45 (Setuju)<br>Kritik pemerintah = 4,18 (Setuju) |
| Nalar Reflektif    | Media Sosial                         | Media sosial memengaruhi = 3,45<br>informasi media sosial = 4,18 (Setuju)<br>memengaruhi pemahaman politik = 3,50<br>Menyaring informasi kritis = 4,05 (Setuju)<br>Diskusi daring > cara berpikir = 3,68                                                                                         |

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Primer (*Kuesioner: Penelitian Literasi Mahasiswa Gen-Z tentang Demokrasi Islami di UIN-Sumatera Utara*, 2026).

3. Kemudian di-integrasi-kan katagori axial coding menuju Tema Inti (Selective Coding) berdasarkan Tipologi Nalar, menghasilkan analisis sebagai berikut:

Tabel 2: Skor Dominan Nalar Gen-Z (Selective Coding)

<sup>37</sup>Field Note: Observasi dan Diskusi: *Penelitian Literasi Mahasiswa Gen-Z tentang Demokrasi Islami di UIN-Sumatera Utara*, 2026.

<sup>38</sup>Dimaksudkan adalah proses berpikir; berdasarkan mode deduktif; induktif; abduktif; analogi.

| Katagori Nalar     | Tema (Essay)                                    | Mean (Likert)             |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Nalar Normatif     | Syura<br>Kedaulatan Allah                       | 4.04 Tinggi/Setuju        |
| Nalar Argumentatif | Keadilan<br>Maslahah<br>HAM                     | 4.09 Tinggi/Sangat Setuju |
| Nalar Integratif   | Amanah<br>Pemilu<br>Voting<br>Kritik Pemerintah | 3.95 Rendah/Setuju        |
| Nalar Reflektif    | Media Sosial                                    | 3.77 Rendah/Setuju        |

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Primer (*Kuesioner: Penelitian Literasi Mahasiswa Gen-Z tentang Demokrasi Islami di UIN-Sumatera Utara, 2026*).

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 22 responden dari mahasiswa Gen-Z setelah ditabulasi (sebagaimana tertera diatas), secara umum terlihat bahwa Gen-Z Muslim memiliki kecenderungan yang positif terhadap demokrasi yang dipadu-padankan dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut ditunjukkan oleh mayoritas indikator yang memiliki nilai **rerata di atas 4,00 (setuju)**. Temuan ini mengindikasikan bahwa responden tidak memandang demokrasi sebagai konsep yang sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sebagai mekanisme politik yang dapat diterima selama dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Hal ini terlihat dari indikator dengan nilai rerata tertinggi adalah **"Rakyat berhak memilih pemimpin"** dengan skor **4,45**. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menerima prinsip partisipasi politik sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang ideal. Tingginya tingkat persetujuan terhadap indikator tersebut memperlihatkan bahwa konsep kedaulatan rakyat tidak dipahami secara mutlak, tetapi ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang lebih luas. Dan mengindikasikan bahwa mahasiswa memandang partisipasi politik sebagai hak yang harus dijamin dalam kehidupan bernegara. Pemilihan pemimpin dipahami sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan, sekaligus sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.

4. Temuan Selective Coding dikerucutkan ke dalam Tipologi Nalar<sup>39</sup> akan menghasilkan analisis sebagai berikut:

<sup>39</sup>Merujuk pada klasifikasi pola pikir dalam memahami sesuatu, dalam filsafat dan epistemologi terdapat tiga tipe utama; bertumpu pada otoritas teks atau wahyu, berlandaskan pada logika rasional dan empiris dan mengandalkan intuisi dan pengalaman spritual. Tipe ini dikonseptualisasikan oleh filsuf Maroko, Muhammad 'Abed al-Jabari.

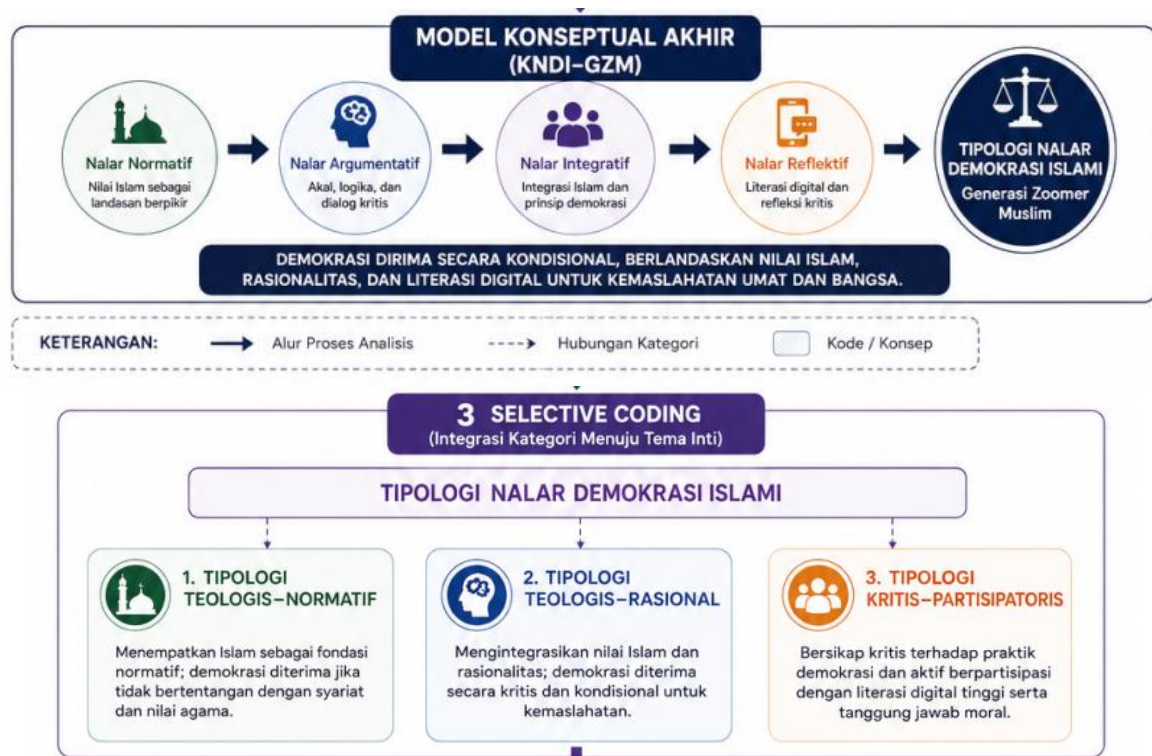


Diagram 2: Kerangka Analisis Coding

Alhasil, analisis skala Likert dibandingkan dengan hasil analisis Essay, terlihat adanya konsistensi yang tinggi antara data data statistik deskriptif dan data kualitatif. Tingginya skor pada indikator-indikator tersebut memperoleh penjelasan yang lebih mendalam melalui argumentasi yang disampaikan responden dalam jawaban Essay. Dengan demikian, kedua jenis data tersebut saling menguatkan (*confirmation*) dan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai proses pembentukan nalar demokrasi pada mahasiswa Gen-Z Muslim. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi politik responden tidak dibentuk oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara internalisasi nilai-nilai Islam, penggunaan nalar rasional, pengalaman bermedia digital, dan evaluasi terhadap praktik demokrasi.

Keempat proses penalaran tersebut menunjukkan bahwa nalar demokrasi mahasiswa Gen-Z Muslim tidak bersifat tunggal. Meskipun seluruh responden sama-sama menjadikan Islam sebagai kerangka normatif, mereka menunjukkan variasi dalam cara mengintegrasikan ajaran agama dengan rasionalitas dan pengalaman sosial (Tipologi Nalar: Teologis Normatif, Teologis Rasional, Kritis Partisipatoris). Variasi tersebut memperlihatkan adanya dinamika pemikiran politik yang berkembang di kalangan generasi muda Muslim sebagai respons terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta kompleksitas demokrasi kontemporer.

Dengan demikian, temuan utama dari hasil penelitian dan pembahasan pada **Penelitian Literasi Mahasiswa Gen-Z tentang Demokrasi Islami di UIN-Sumatera Utara-2026** adalah bahwa "Nalar Demokrasi Islami – Generasi Zoomer Muslim bukan merupakan nalar yang bersifat dikotomis antara Islam dan demokrasi, melainkan nalar rasionalitas yang bersifat integratif, deliberatif, dan kontekstual". Ini menunjukkan Model Konseptual: **"Konstruksi Nalar Demokrasi Islami – Generasi Zoomer Muslim (KNDI-GZM)"** yang mendominasi pada **"Tipe Nalar Rasional ~ Teologis (Theological Rational Reasoning)"**, ialah *menilai demokrasi melalui argumentasi rasional, wahyu, dan evaluatif*. Artinya, Mahasiswa Gen-Z Muslim mengembangkan nalar demokrasi Islami secara rasional, yang memadukan orientasi teologis dan integrasi deliberatif melalui literasi digital dalam menerima demokrasi secara kondisional berdasarkan nilai-nilai Islam. Demokrasi diterima bukan karena identitas ideologisnya, tetapi karena kemampuannya menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣhid al-syarī'ah*), seperti *al-'adl*, *al-maṣḥlahah*, *al-masāwāh*, serta pemerintahan yang amanah dan akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis representatif kualitatif, penelitian ini tidak hanya berhasil mengidentifikasi tipologi nalar demokrasi Islami Gen-Z Muslim, tetapi juga merumuskan suatu model konseptual mengenai proses terbentuknya nalar tersebut. Model ini merupakan sintesis dari seluruh temuan empiris yang diperoleh melalui analisis skala Likert, jawaban Essay, serta interpretasi teoritis terhadap hubungan antara agama, rasionalitas, demokrasi, dan literasi digital.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya memosisikan Islam dan demokrasi sebagai dua variabel yang saling berhadapan atau saling menyesuaikan, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan nalar demokrasi Gen-Z Muslim berlangsung melalui mekanisme yang lebih kompleks. Demokrasi tidak diterima maupun ditolak secara langsung, tetapi diproses melalui serangkaian tahapan kognitif yang melibatkan internalisasi nilai agama, penggunaan pertimbangan rasional, interaksi dengan lingkungan digital, serta refleksi terhadap realitas sosial-politik.

Model ini menunjukkan bahwa nalar demokrasi merupakan hasil konstruksi sosial-kognitif yang bersifat dinamis. Setiap individu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi oleh interaksi berbagai dimensi yang saling memperkuat maupun saling mengoreksi. Model KNDI-GZM ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian politik Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa konstruksi nalar demokrasi Gen-Z Muslim tidak dapat dijelaskan hanya melalui variabel religiositas atau sikap politik. Model ini memperlihatkan bahwa pembentukan nalar merupakan hasil interaksi antara fondasi normatif keagamaan, kemampuan berpikir rasional, pengalaman bermedia digital, dan evaluasi terhadap praktik demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas diskusi mengenai relasi Islam dan demokrasi dari sekadar perdebatan normatif menuju penjelasan mengenai proses kognitif dan sosial yang membentuk cara pandang generasi muda Muslim.

### 3. Model Nalar Generasi Zoomer Muslim Tentang Demokrasi Islami

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dimensi rasional memiliki posisi yang relatif kuat dalam konstruksi nalar demokrasi mahasiswa Gen-Z Muslim. Meskipun orientasi teologis tetap menjadi kerangka normatif utama sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, responden tidak menunjukkan kecenderungan menerima setiap pandangan keagamaan secara dogmatis. Sebaliknya, mereka memperlihatkan kecenderungan melakukan evaluasi melalui pertimbangan logis, pengalaman empiris, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran dari pola nalar yang bersifat otoritatif menuju pola nalar reflektif, tanpa meninggalkan landasan normatif Islam. Temuan dari angket kuesioner ini memperlihatkan bahwa Mahasiswa Gen-Z Muslim – cenderung meng-argumentatif-kan berbagai sumber pengetahuan – dalam proses memahami demokrasi Islami. Dengan demikian, konstruksi nalar responden bersifat rasional secara normatif.

Diagram di atas memperlihatkan bahwa proses analisis data penelitian, dilakukan penulis secara bertahap. Tahap pertama adalah *open coding*, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama yang muncul dari Jawaban Essay responden, seperti *syūrā*, *‘adl*, amanah, *mashlahah*, kedaulatan Allah, pemilu, hak asasi manusia, kritik terhadap pemerintah, media sosial, dan literasi digital. Konsep-konsep tersebut merupakan representasi langsung dari pengalaman dan argumentasi responden dalam memahami demokrasi dan politik Islam.

Pada tahap berikutnya dilakukan *axial coding*, yaitu mengelompokkan kode-kode awal ke dalam kategori konseptual yang memiliki hubungan makna. Hasil pengelompokan menunjukkan empat konstruksi utama, yaitu Nalar Normatif, Nalar Argumentatif, Nalar Integratif, dan Nalar Reflektif. Keempat kategori ini menggambarkan dimensi-dimensi yang membentuk proses berpikir mahasiswa Gen-Z Muslim dalam mengevaluasi demokrasi.

Tahap terakhir adalah *selective coding*, yaitu mengintegrasikan seluruh kategori konseptual ke dalam tema inti penelitian (*core category*). Hasil integrasi tersebut menghasilkan Tipologi Nalar Demokrasi Islami Generasi Zoomer Muslim, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Model Konstruksi Nalar Demokrasi Islami Generasi Zoomer Muslim (KNDI-GZM) sebagai temuan konseptual penelitian.

Dimensi Tipe Nalar Rasional menunjukkan kecenderungan yang cukup kuat dalam pola berpikir responden. Pernyataan tema "*mempertimbangkan logika dalam menilai demokrasi (Keadilan, Kemaslahatan, HAM)*" memperoleh nilai rata-rata sebesar **4.09 (Tinggi/Sangat Setuju)**, dengan **81% responden** berada pada kategori setuju dan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menggunakan legitimasi normatif keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan argumentasi rasional dalam mengevaluasi praktik demokrasi. Pernyataan mengenai keterbukaan terhadap perbedaan pandangan memperoleh **mean tertinggi kedua sebesar 4,36**, sebanyak **90,9% responden menyatakan setuju maupun sangat setuju**. Temuan ini memperlihatkan adanya karakter deliberatif dalam pola pikir responden yang cenderung menerima pluralitas gagasan sebagai bagian dari kehidupan demokratis.<sup>40</sup>

Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses berpikir responden tidak berhenti pada penerimaan doktrin, melainkan melibatkan proses penalaran. Dengan kata lain, demokrasi dinilai melalui argumentasi yang dianggap masuk akal serta relevan dengan kondisi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nalar keagamaan responden tidak bersifat anti-rasional, melainkan memperlihatkan adanya integrasi antara wahyu dan akal dalam proses pengambilan sikap politik. Kecenderungan tersebut sejalan dengan tradisi intelektual Islam yang menempatkan akal sebagai instrumen penting dalam memahami realitas.<sup>41</sup>

Dalam sejarah pemikiran Islam, penggunaan akal tidak diposisikan sebagai lawan wahyu, melainkan sebagai sarana untuk memahami hikmah dan kemaslahatan yang terkandung dalam ajaran agama. Oleh karena itu, tingginya tingkat persetujuan responden terhadap penggunaan logika menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memandang demokrasi secara hitam-putih, tetapi melakukan proses evaluasi berdasarkan argumentasi yang rasional sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai Islam.<sup>42</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi nalar demokrasi Islami pada mahasiswa Gen-Z Muslim tidak dapat dijelaskan melalui dikotomi sederhana antara menerima atau menolak demokrasi. Sebaliknya, responden membangun pemahaman melalui proses integrasi antara nilai-nilai Islam, rasionalitas, pengalaman akademik, pengalaman sosial, serta literasi digital. Temuan ini melahirkan model Konstruksi Nalar Demokrasi Islami Generasi Zoomer Muslim (KNDI-GZM) yang disusun secara induktif berdasarkan hasil observasi, FGD, kuesioner Likert, jawaban esai, dan proses coding tematik.

Analisis menghasilkan empat tipologi utama nalar demokrasi Islami. Nalar Normatif menempatkan Al-Qur'an, Sunnah, syūrā, keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagai sumber legitimasi politik. Nalar Argumentatif memperlihatkan penggunaan logika, argumentasi rasional, dan keterbukaan terhadap dialog dalam mengevaluasi demokrasi. Nalar Integratif menunjukkan kemampuan menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan mekanisme demokrasi modern secara kontekstual. Sementara itu, Nalar Reflektif menggambarkan kemampuan mahasiswa memanfaatkan media digital secara kritis melalui proses verifikasi informasi sebelum membentuk pandangan politik. Keempat tipologi tersebut menunjukkan bahwa nalar politik Gen-Z Muslim bersifat dialogis, multidimensional, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Hasil analisis skala Likert memperlihatkan kecenderungan positif terhadap demokrasi yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Responden menerima prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan pemimpin, kebebasan berpendapat, partisipasi politik, akuntabilitas pemerintahan, dan kritik terhadap penguasa, tetapi penerimaan tersebut bersifat kondisional. Demokrasi dipandang sah sepanjang menjamin keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan tidak bertentangan dengan

<sup>40</sup>Kuesioner: *Penelitian Literasi Mahasiswa...*, 2026.

<sup>41</sup> Mardian Idris Harahap, et.al., "Musyawarah dalam Al-Qur'an Perspektif Muffassir Nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy)", dalam *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 8, No.3, (Padang: IICET, 2023), h. 325-326.

<sup>42</sup>Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *The Reconciliation of The Fundamentals of Islamic Law*, Vol.1, Terj. Imran Ahsan Khan Nyazee, (Berkshire: Garnet Publishing, 2012), h. 173-174.

prinsip-prinsip syariat. Temuan mengenai tingginya dukungan terhadap hak rakyat memilih pemimpin dan rendahnya persetujuan terhadap musyawarah tanpa mufakat menunjukkan bahwa responden lebih mengutamakan demokrasi deliberatif daripada sekadar dominasi suara mayoritas.

Analisis jawaban esai menguatkan temuan kuantitatif bahwa responden tidak memandang demokrasi sebagai ideologi yang diterima ataupun ditolak secara mutlak. Demokrasi dipahami sebagai instrumen politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan apabila dijalankan berdasarkan syūrā, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan demikian, legitimasi politik tidak hanya berasal dari prosedur demokratis, tetapi juga dari dimensi moral dan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan etis penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media digital telah menjadi ruang utama pembentukan literasi politik mahasiswa Gen-Z Muslim. Meskipun media sosial menjadi sumber informasi yang dominan, responden memperlihatkan kecenderungan melakukan tabayyun atau verifikasi informasi sebelum menerima suatu narasi politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan formal, literasi digital, pengalaman organisasi, dan refleksi keagamaan bekerja secara simultan dalam membentuk konstruksi nalar demokrasi Islami. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini bukan hanya menggambarkan sikap mahasiswa terhadap demokrasi, tetapi juga menawarkan model konseptual **KNDI-GZM** sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan proses pembentukan nalar demokrasi Islami pada Generasi Zoomer Muslim.

Saran

Perguruan tinggi perlu memperkuat literasi demokrasi berbasis nilai-nilai Islam melalui pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan politik, etika kewargaan, dan literasi digital agar mahasiswa mampu menghadapi disinformasi, radikalisme, serta polarisasi di ruang digital. Pendidikan politik bagi Gen-Z sebaiknya tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural demokrasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dialogis, dan reflektif sehingga partisipasi politik dibangun atas dasar argumentasi yang rasional sekaligus berlandaskan nilai-nilai keislaman. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model **KNDI-GZM** menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti **Structural Equation Modeling (SEM)** atau **Partial Least Squares-SEM (PLS-SEM)**, untuk memverifikasi validitas konstruk serta menguji pengaruh literasi digital, orientasi keislaman, literasi demokrasi, dan rasionalitas publik terhadap pembentukan nalar demokrasi Islami dan perilaku kewargaan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asharudin, Ropip. (2023), "Analisis Pemikiran Jean Baudrillard tentang Simulasi dan Realitas dalam Konteks Era Digital", dalam *Gunung Djati CS*, Vol.24, (Bandung: Gunung Djati Conference Series).
- Asshiddiqie, Jimly. (2011), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arnett, Jeffrey Jensen. (2004), *Emerging Adulthood: The Winding Road From the Late Teens Through The Twenties*, (New York: Oxford University Press).
- Bauman, Zygmunt. (2006), *Liquid Modernity*, (Cambridge: Polity Press).
- Bourdieu, Pierre. ( 2010), *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, Terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta, Kreasi Wacana).
- Creswell, Jhon W. et. al. (2018), *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Ed. 4.. (New York: Sage Publications).
- Charmaz, Kathy. (2006), *Constructing Grounded Theory: Practical Guide Through Qualitative Analysis*, (London: Sage Publication).
- Freire, Paulo. (1985), *Pendidikan Kaum Tertindas*, Terj. Mansour Fakih dkk, Ed. Imam Ahmad, Cet. 1, (Jakarta: LP3ES).
- Guest, Greg. et. al. (2020), *Applied Thematic Analysis*, Ed. 2, (New York: Sage Publications).
- Harahap, Mardian Idris. (2019), "Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholish Madjid", dalam *Jurnal Al-Harakah*, Vol. 3 No. 3, (Medan: Jurnal UINSU).

- Harahap, Mardian Idris et.al., (2025), “Ayat-Ayat Tentang Bermusyawarah dalam Al-Qur’an (QS Ali Imran 159, QS Asy Syura 38, Al Baqarah 233)”, dalam *JURNAL MUDABBIR*, Vol. 5, No. 2, (Medan: Permapendis SUMUT).
- Harahap, Mardian Idris. et.al. (2023), “Musyawarah dalam Al-Qur’an Perspektif Muffassir Nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy)”, dalam *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 8, No.3, (Padang: IICET).
- Harahap, Syahrin. (2002), *Metodologi Studi & Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Harahap, Syahrin. et. al. (2019), *Wahdatul ‘Ulūm: Paradigma Pengembangan Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (Medan: IAIN Press).
- Hariyanto. (2024). “Alienasi Digital Di Indonesia: Analisa Pemikiran Karl Marx Dan Dampak Sosial Media Terhadap Alienasi Manusia”, dalam *Socius*, Vol.1, No.7, (Jakarta: Yayasan Daarul Huda).
- Heriyanto. (2018), “Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif”, dalam *Anuva*, Vol. 2, No. 3, (Semarang, E-Journal Undip).
- Hidayat, Komaruddin. (2015), *Psikologi Beragama*, (Jakarta: Mizan).
- Junaidi. et. al. (2026), “Fenomena Fomo dan Perilaku Konsumtif Generasi Z Perspektif Tafsir Misbah”, dalam *ALWATZIKHOEBILLAH*, Vol. 12, No. 1, (Sambas: Journal IAISAMBAS).
- Kasali, Rhenald. (2017), *Disruption: Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*, Cet.13, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Kvale, Steinar. et. al. (2009), *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, Ed.2, (California: Sage Publications).
- Lincoln, Yvonna S. et. al. (1985), *Naturalistic Inquiry*, (California: Sage Publication).
- Maxwell, Joseph. A. (2005), *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*, Ed. 2, (California: Sage Publications).
- Patton, Michael Quinn. (2015), *Qualitative Research & Evaluation Methods*, Ed. 3, (New York: Sage Publications).
- Shihab, M. Quraish. (1992), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan).
- al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. (2012), *The Reconciliation of The Fundamentals of Islamic Law*, Vol.1, Terj. Imran Ahsan Khan Nyazee, (Berkshire: Garnet Publishing).
- Wijoyo, Hadion. et.al. (2020), *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0.*, Cet.1, (Banyumas: Pena Persada).
- Kuesioner: *Penelitian Literasi Mahasiswa Gen-Z tentang Demokrasi Islami di UIN-Sumatera Utara*, 2026.
- Field Note Observasi dan Diskusi: *Penelitian Literasi Mahasiswa Gen-Z tentang Demokrasi Islami di UIN-Sumatera Utara*, 2026.